

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-08/1.02/PPATK/05/2013 TENTANG
 PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN
 DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI

Nomor :..... Jakarta,.....
 Sifat : Sangat Rahasia
 Lampiran :..... lembar
 Perihal : Permintaan informasi¹

Kepada Yth.
 Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
 Transaksi Keuangan
 Jl. Ir. H. Juanda No. 35
 Jakarta 10120

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.: B-6/IV/2011 dan No.: NK-44/1.02/PPATK/04/11 tanggal 18 April 2011;
4. Laporan Polisi No. Pol.:.....;
5. Surat Perintah Penyidikan No.Pol :.....

Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (*disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani*) dengan tersangkayang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (*disesuaikan dengan satuan wilayah kerja*), bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini.

¹Permintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Sehubungan dengan permintaan informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Kapolri/Kapolda Nomor: (copy terlampir) yaitu E-mail :..... telepon Hp.....

Demikian untuk menjadi Maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kapolda/Dir Reskrim Polda

LAMPIRAN

1. **Penjelasan Singkat Duduk Perkara**
Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 2002 dan 2003 dengan rekanan PT. ABC dan PT XYZ diduga terjadi *mark up* pada harga-harga yang terkait. Dari hasil *mark up* tersebut diindikasikan telah terjadi *kick back* kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provinsi Y tersebut.
2. **Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar*)**
 - a. *Mark up* yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. *Kick Back* yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal (*proceeds of crime*) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*) Dalam hal pihak peminta informasi bukan penyidik, maka pasal perundang-undangan yang dilanggar dapat tidak dicantumkan.
3. **Dugaan Transaksi yang Mencurigakan**
Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut:

No.	Nama	Bank	Nomor Rekening	Periode Waktu
1.	PT ABC	Bank TOP	397-300-409-0	November 2002 s/d Desember 2003
		Bank Samiun	203.04.07368	September 2003 s/d Juni 2004
2.	PT XYZ	Bank Asing	743.30.07074.9	November 2002 s/d Desember 2003

4. **Informasi yang Diperlukan**
 - a. Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan *kick back* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - b. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

No.	Nama
1	BTW
2	ACE
3	ZZZ

Nomor :.....
 Sifat : Sangat Rahasia
 Lampiran :..... lembar
 Perihal : Permintaan informasi²

Jakarta,.....

Kepada Yth.
 Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
 Transaksi Keuangan
 Jl. Ir. H. Juanda No. 35
 Jakarta 10120

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan;
3. Nota Kesepahaman antara Kementerian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (jika ada).

Merujuk surat Menteri No.... tanggal ... perihal Calon Anggota Komisi periode 2013-2017 dengan ini disampaikan bahwa para calon anggota Komisi tersebut telah melalui tahapan seleksi dan pertimbangan rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi. Dalam rangka melengkapi bahan pertimbangan dan masukan kepada Presiden RI, dimohon agar PPATK dapat melakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya catatan khusus yang dimiliki oleh para calon sebelum diajukan Presiden RI kepada DPR RI. Adapun nama calon anggota Komisi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Alamat	Jabatan	Nama Bank dan No. Rekening

Terlampir disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenai keterangan harta kekayaan dari calon anggota komisi dimaksud.

Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini.

²Permintaan informasi untuk tujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis.

Sehubungan dengan permintaan informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Nomor E-mail :..... telepon Hp.....

Demikian untuk menjadi Maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF